

BAB III

KITAB KITAB MIR'ÂTU ATH-THULLÂB AS- SINGKILI

A. Kitab *Mir'âtu ath-Thullâb*

Mir'âtu ath-Thullâb fî Tashîl Ma'rifat al-Ahkâm al-Syar'iyah li al-Malik al-Wahhâb. Karya ini diakui sebagai karya perdana ulama Nusantara di bidang fiqh yang menggunakan bahasa Melayu beraksara Jawi-Pegon. Memang, sebelumnya hampir dua abad sebelumnya sudah ada beberapa karya Walisongo yang ditulis dengan menggunakan aksara Jawa (hanacaraka) yang lebih banyak membahas tasawuf dan akhlak. Karya as singkili adalah sebuah mahakarya yang tebalnya 650 halaman, ditulis pada periode awal ulama Nusantara. kitab ini ini disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik pembahasannya sangat komprehensif berkaitan dengan kompleksitas persoalan fiqh pada zamannya.

Kitab ini ini menjadi rujukan oleh para hakim pada kerajaan Aceh, Karena kitab ini ini lahir atas permintaan sulthonah tersebut. kitab ini adalah kitab yang bermazhab Syafi'i merujuk dari berbagai kitab-kitab Salaf yang muktabar, sesuai dengan kondisi masyarakat kerajaan Aceh pada zaman itu yang menganut Mazhab Syafi'i., jelas menunjukkan bahwa as-Singkili adalah ulama bermadzhab Syafi'i, sebagaimana madzhab ini dianut oleh mayoritas rakyat kesultanan Aceh dan kawasan Nusantara saat itu dan hingga saat ini. As-Singkili menunjukkan kualitas keilmuannya melalui kitab ini, antara lain dengan cara mengupas sebuah permasalahan dengan pola tanya jawab. Isi pertanyaan seputar masalah keseharian yang dialami oleh masyarakat pada umumnya dan kemudian dijawab dengan

menggunakan perangkat keilmuan yang dimiliki, disertai dengan berbagai rujukan kitab yurisprudensi klasik. “Kitab yang disajikan oleh Syaikh Abdurrauf as-Singkili ini merupakan kontribusi besar masyarakat Aceh semasanya dan setelah hidupnya. Pengarang kitab dalam menjelaskan duduk permasalahan hukum sangat berhati-hati dan tidak terlepas dari berbagai pertimbangan, yakni atas dasar pertimbangan sosial dan sultan,” tulis Muliadi Kurdi dkk dalam penerbitan ulang *Mir’ātu ath-Thullâb* beraksara Latin yang diterbitkan ulang atas usaha Lembaga Naskah Aceh (NASA), pada tahun 2015 silam.¹

Mir’ātu ath-Thullâb ini ditulis atas permintaan Sultanah Shafiyat al-ddin, penguasa Kesultanan Aceh, dan diselesaikan pada 1074 H/1663 M. As-Singkili mempersembahkan kitab ini di hadapan sang ratu pada hari Sabtu, 8 Jumadil Akhir 1083 H/ 1 Oktober 1672 M. Ratu ini adalah istri Sultan Iskandar Tsani, yang menggantikan suaminya dan berkuasa relatif lama sejak tahun 1051 H/1641 M hingga 1086 H/1675 M. Manshur bin Yusuf al-Mishri, pelancong asal Mesir yang singgah di istana dalam lawatannya, menggambarkan sang ratu sebagai perempuan muslimah yang ramah dan sempurna.² Di akhir era sang ratu ini, *Mir’ātu ath-Thullâb* diselesaikan oleh as-Singkili. Sultanah Shafiyatuddin pantas berterimakasih kepada as-Singkili, sebab melalui karya ini pada akhirnya seorang penguasa Aceh memiliki standar pegangan ketika akan memutuskan sebuah perkara dan para hakim (qadhi) di Aceh saat itu memiliki kitab standar rujukan, selain al-Sirath al-Mustaqim karya Syaikh Nuruddin al-Raniri. Namun, tidak seperti al-Sirath al-Mustaqim yang 70% membahas masalah ibadah, kitab *Mir’ātu*

¹ Syaikh Abdurrauf as-Singkili, *Mir’ātu ath-Thullâb fi Tashil Ma’rifat al-Ahkam al-Syar’iyyah li al-Malik al-Wahhab*, terj. Muliadi Kurdi dkk (Aceh: NASA, 2015), h. ix.

² Michael Laffan, *Sejarah Islam di Nusantara* (Bandung: Bentang, 2015), h. 18.

ath-Thullâb mengemukakan banyak aspek dari fiqh, termasuk kehidupan politik, sosial, ekonomi dan keagamaan kaum muslimin.

Karena mencakup topik-topik yang begitu luas, karya ini jelas merupakan kitab penting di bidang tersebut. Referensi utama karya ini adalah *Fath al-Wahhab* karya Imam Zakariya al-Anshari. Selain itu, as-Singkili juga mengambil bahan dari buku-buku standar seperti *Fath al-Jawwad* dan *Tuhfat al-Muhtaj*, dua karya Ibnu Hajar al-Haitami (w. 973 H/ 1565 M), *Nihayat al-Muhtaj* karya Syamsuddin al-Ramli, Tafsir al-Baidhawi karya Ibnu Umar al-Baidhawi (w. 685 H/1286 M), *Ihya' Ulūmiddin* karya Imam al-Ghazali (w. 505 H/ 1111 M), *Najm al-Wahhaj ilâ Syarh al-Minhaj* karya Jamaluddin Muhammad bin Musa al-Damiry (w.808 H/ 1405 M) dan kitab *Syarh Shahih Muslim* karya Imam al-Nawawi (w. 676 H/ 1277 M). Dengan sumber-sumber ini, menurut Azyumardi Azra, as-Singkili menjelaskan hubungan dan koneksi intelektualnya dengan jaringan ulama internasional.³

Melalui kitab *Mir'âtu ath-Thullâb*, as-Singkili menunjukkan kepada kaum muslimin di kepulauan Nusantara bahwa doktrindoktrin hukum Islam tidak terbatas kepada ibadah, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun kitab *Mir'âtu ath-Thullâb* tidak lagi digunakan di Nusantara dewasa ini, namun di masa lampau, kitab ini menjadi salah satu kitab rujukan terpenting kerajaan Islam di kepulauan Nusantara. Menurut M.B. Hooker, salah seorang orientalis, sebagaimana dikutip Azyumardi Azra, mengemukakan jika kitab Lumarān, salah satu kumpulan hukum Islam yang digunakan umat Islam di

³ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 246.

wilayah Mindanao, Filipina, sejak pertengahan abad XIX Masehi, menjadikan kitab *Mir'âtu ath-Thullâb* ini sebagai salah satu acuan utamanya. Salah satu bagian pembahasan mengenai waris di kitab ini, yang kemudian dibukukan menjadi Kitab *Fara-idh*, bahkan digunakan sebagai rujukan oleh sebagian besar kaum muslimin Melayu-Indonesia di masa belakangan.

Mir'âtu ath-Thullâb adalah kesinambungan dari kitab *Masa'il al-Mubtadi*, *Bidayah al-Mubtadi* dan *Umdat al-Awlad* karangan Syekh Abdurrauf as-Singkili yang berkaitan fikah ibadat. Manakala *Mir'âtu ath-Thullâb* adalah sebuah kitab fikah mazhab Syafi'i yang mencakupi pelbagai persoalan bidang kehidupan manusia termasuk muamalat, ia sebagai panduan kepada qadi dan umat Islam di seluruh Alam Melayu (Kerajaan Aceh Darussalam dan kerajaankerajaan Melayu naungannya).

B. Kandungan Kitab *Mir'âtu ath-Thullâb*

Konteks saat kitab ini ditulis, *Mir'âtu ath-Thullâb* merupakan naskah fiqh yang paling tebal dan paling lengkap sepanjang hidup penulisnya. Pola penyelesaian hukum yang disajikan dalam penulisan kitab, antara lain, dengan memunculkan pertanyaan dan disambung dengan jawaban. Melalui pendekatan tanya jawab yang dialogis ini, pengarang lebih mudah menyajikan solusi atas sebuah permasalahan yang ada. Selain itu, pola dialog semacam ini juga bisa menguak permasalahan hukum yang telah terjadi, sedang terjadi maupun memprediksikan problem fiqh yang akan terjadi. Gaya semacam ini juga bisa

disaksikan dalam naskah-naskah yang ditulis setelah karya ini oleh para ulama Nusantara, misalnya *Sabîl al-Muhtadîn* karya Syaikh Arsyad al-Banjari.

Dengan merujuk kepada karya-karya ulama salaf, seperti karya Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hajar al-Haitami, Syamsuddin al-Ramli dan beberapa nama lain, as-Singkili lebih leluasa menjawab berbagai pertanyaan, meskipun nama ulama-ulama di atas hanya disebut beberapa kali dan as-Singkili lebih sering tidak menyebutkan sumber referensi jawabannya. Jika disebutkan sumbernya, biasanya hanya ditulis nama ulama dan kitabnya, misalnya, "seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab *Fathul Jawwad...*", maupun "Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulūmiddin...*" atau "dalam kitab *Tuhfah* disebutkan...." dan kalimat-kalimat lain yang sejenis.

Dengan ketebalan di atas rata-rata, kitab *Mir'ātu ath-Thullâb* dibagi dalam 71 bab. Masing-masing bab membahas topik berbeda, dari fiqh mu'amalah, munakahat, jinayah (pidana Islam), ahwal al-syakhsiyyah, hingga soal siyasah (politik). Karena merupakan buku standar rujukan para qadhi (hakim), maka mulamula as-Singkili membahas peranan seorang hakim, hak dan tanggungjawabnya serta konsekuensi ketika mengkhianati sumpah dan menyalahgunakan jabatannya.

Setelah membuka melalui muqaddimah-nya, as-Singkili menempatkan peranan qadhi sebagai titik pijak pembahasan kitab. Penulis menilai, penempatan bahasan syarat, tanggungjawab dan tugas seorang qadhi di awal kitab fiqh adalah sesuatu yang tidak lazim. Sebab, sebagaimana biasanya, kajian tentang thaharahlah yang menjadi pembuka sebuah kitab fiqh. Penulis menduga, jika dengan cara

inilah as-Singkili memberikan pesan kuat kepada para qadhi mengenai kewajiban dan tanggungjawabnya dalam membantu masyarakat menyelesaikan berbagai perkara. Dengan menempatkan pembahasan mengenai peranan qadhi, maka as-Singkili memberikan rambu-rambu kehati-hatian dalam memberikan putusan berdasarkan kitab *Mir'âtu ath-Thullâb* ini maupun ijtihad pribadi seorang hakim dalam menentukan sebuah putusan hukum.

Sebagai seorang mufti kesultanan, yang menjadi bagian struktur kerajaan, yang menarik adalah pada saat as-Singkili membahas perkara pemberontakan (*bughat*). Menurut as-Singkili, *bughat* adalah perbuatan terlarang yang membahayakan stabilitas politik dan harus ditumpas. “Maka, apabila diperoleh segala syarat yang tersebut itu, niscaya wajiblah memerangi mereka itu, tetapi tiada harus memerangi mereka itu melainkan kemudian daripada disuruhkan oleh imam kepada mereka itu seseorang yang kepercayaan, yakni yang adil lagi memberi nasihat lagi cerdik memeriksai pekerjaan yang dikebenci mereka itu daripada imam.”⁴

Menurut as-Singkili, jika syarat-syarat disebut sebagai tindakan pemberontakan (*bughat*) sudah terpenuhi, maka wajib bagi seorang sultan untuk bertindak. Namun jika ternyata syaratsyarat *bughat* tidak terpenuhi, maka sudah sewajibnya seorang penguasa mengutus orang kepercayaan yang bijaksana, adil dan cerdik, untuk menyelidiki penyebab ketidaksukaan mereka terhadap penguasa. Penulis sengaja mengambil bab *bughat* dalam *Mir'âtu ath-Thullâb* sebagai pintu masuk menelisik pemikiran as-Singkili sebagai seorang ulama yang

⁴ Syaikh Abdurrauf as-Singkili, *Mir'âtu ath-Thullâb*, h. 510.

dekat dengan kekuasaan. Posisinya sebagimufti kesultanan pada dasarnya juga dipandang sebagai bagian dari inkubator kebijakan penguasaan di zamannya, yaitu Sultanah Shafiyatuddin, permaisuri Sultan Iskandar Tsani. Sebelum era kemuftian as-Singkili, Sultanah Shafiyatuddin telah didampingi ulama lain, seperti Nuruddin al-Raniri, yang kemudian kembali ke tanah kelahirannya di Randir India, dilanjutkan kemudian oleh Syaikh Saif al-Rijal, ulama keturunan Minangkabau yang ditengarai pernah belajar ke Universitas al-Azhar.⁵

Memandang masalah pemberontakan ini, as-Singkili juga mengikuti pendapat beberapa pakar politik Islam. Sebagaimana para ahli fiqh klasik yang menganjurkan upaya preventif untuk mencegah pemberontakan, demikian pula as-Singkili berpendapat demikian. Jika syarat-syarat disebut sebagai sebuah pemberontakan telah terpenuhi dan jika para pemberontak ini belum bisa taat kepada imam, maka utusan sultan bisa melakukan pendekatan dengan cara berdialog (munadzarah). Jika nanti pendekatan ini gagal membujuk para pemberontak, maka langkah terakhir bisa digunakan, yaitu berperang. Namun as-Singkili memberi tahu bahwa apabila dalam pertempuran ini ada salah satu anggota pemberontak yang lari, maka tidak boleh dibunuh, demikian pula jika ada pemberontak yang dalam kondisi lemah.⁶

As-Singkili juga menegaskan jika upaya pemadaman pemberontakan ini tidak boleh melampaui batas-batas kemanusiaan. Jika dalam peperangan lazimnya boleh mengambil harta benda milik musuh sebagai rampasan perang, namun dalam kasus pemberontakan, dirinya melarang tindakan ini. “Wajib kita

⁵ Michael Laffan, *Sejarah Islam di Nusantara*, 15

⁶ Syaikh Abdurrauf as-Singkili, *Mir'âtu ath-Thullâb*, 510.

mengembalikan barang yang kita ambil daripada mereka (pemberontak, pen.) itu dan tiada harus bagi kita memakai dia pada perang atau yang lainnya melainkan karena dharurat,” tulisnya.⁷

Pendapat as-Singkili sejalan dengan Imam al-Mawardi, salah satu peletak dasar-dasar politik Islam, yang menjelaskan dalam karyanya berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, jika sebelum memerangi para pemberontak, seorang penguasa hendaklah memberi peringatan terlebih dulu kepada mereka dan kemudian menyuruh mereka meminta ampunan. Jika mereka tetap memberontak, panglima perang diperbolehkan memerangi mereka dengan berhadap-hadapan dan tidak diperbolehkan menyerang mereka secara mendadak.⁸

Al-Mawardi bahkan merinci berbagai persyaratan lain yang ketat agar penumpasan pemberontak ini sesuai dengan kaidah penanganan kriminal, bukan sebagaimana memerangi musuh internal. Sebagai seorang bermadzhab Syafi'i yang tidak ceroboh menuduh orang lain fasiq, murtad maupun kafir, demikian juga dengan pendapat as-Singkili. Terhadap pelaku bughat, dirinya enggan menuduh mereka sebagai fasiq, hanya menganggap keyakinan mereka untuk memberontak merupakan suatu tindakan yang salah.⁹ Berdasarkan pencermatan penulis, komposisi fiqh dalam kitab ini adalah 40% membahas fiqh mu'amalah, 10% fiqh munakahat, 20% fiqh jinayah dan 10% fiqh mawaris, sisanya berkaitan dengan pokok persoalan ahwal as-syakhsiyyah.

⁷ *Ibid.*, h.511.

⁸ Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Mawardi, *al-Ahkam alSulthaniyyah* (Kairo: Dar al-Hadits, 2006), h.101.

⁹ Syaikh Abdurrauf as-Singkili, *Mir'âtu ath-Thullâb*, h.511.

Selain kitab *al-Shirât al-Mustaqîm* karya al-Raniry, yang diikuti *Mir'âtu ath-Thullâb*-nya as-Singkili, juga dijumpai kitab *Sabîl al-Muhtadîn* karya Arsyad al-Banjary yang digunakan sebagai rujukan keputusan para hakim di Kesultanan Banjar. Berdasarkan berbagai rujukan yang digunakan, berikut kerangka fiqh yang dipakai dalam penulisan kitab *Mir'âtu ath-Thullâb*, as-Singkili telah “resmi” membawa dan meneguhkan eksistensi madzhab Syafi’i di bumi Aceh, dan bisa dikatakan, as-Singkili telah “menggelar karpet merah” bagi terselenggaranya dominasi madzhab Syafi’i di Nusantara di kemudian hari melalui jejaring murid-muridnya yang lintas teritorial, seperti Syaikh Yusuf al-Maqassary Makassar (1037-1111 H/1627-1699 M), Syaikh Abdul Muhyi Pamijahan Jawa Barat, Syaikh Burhanuddin Ulakan Sumatera Barat (1056-1104 H/1646-1692 M) maupun Syaikh Abdul Malik bin Abdullah (1089-1149 H/1678-1736 M) yang dikenal dengan nama Tuk Pulau Manis, dari Trengganu, Malaysia.

Selain nama-nama ulama tersebut, masih ada murid terdekat as-Singkili, yaitu Syaikh Dawud al-Jawi al-Fanshuri bin Ismail bin Agha Musthafa bin Ali al-Rumi. Nama panjangnya ini memungkinkan dugaan bahwa Syaikh Dawud ini merupakan peranakan Turki-Melayu. Nama terakhir ini, menurut A. Hasjmy sebagaimana dikutip Azyumardi Azra, adalah editor *Tarjuman Mustafid*, tafsir al-Qur’an karya as-Singkili. Demikian dekat hubungannya as-Singkili dengan nama ini, ketika wafat Syaikh Dâwud dimakamkan di samping makam gurunya ini.¹⁰

Berdasarkan fakta jejaring para muridnya yang lintas teritorial di Nusantara, dipahami bahwa as-Singkili menjadi server yang memperluas jaringan

¹⁰ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah*, h. 258-259

ulama Syafi'iyah. Meskipun, tentu saja, ulama pendahulu as-Singkili, seperti Nuruddin al-Raniri dengan karyanya, *al-Shirât al-Mustaqîm* dan kitab politik *Bustan al-Salathin* serta kitab *Sabîl al-Muhtadîn* nya Syaikh Arsyad al-Banjari, juga turut serta memberikan kontribusi penting bagi tumbuhkembangnya madzhab Syafi'i di bumi Nusantara. Menurut Martin van Bruinessen, adanya kitab *al-Shirât al-Mustaqîm* karya al-Raniri dan kitab *Mir'âtu ath-Thullâb* karya as-Singkili menunjukkan, paling tidak, sejak tahun 1600 M dan seterusnya terdapat suatu minat yang serius terhadap syariat, di samping tasawuf di kalangan kaum muslim Sumatera.¹¹

C. Ringkasan Kitab Hukum-Hukum Muamalah dalam *Mir'âtu ath-Thullâb*

Setidaknya ada 36 masalah Fikih Muamalat yang dibahas terperinci dalam *Mir'âtu ath-Thullâb*, pada paparan ini penulis akan mengutip sedikit semua bagian hukum-hukum muamalah yang ada pada *Mir'âtu ath-Thullâb*, sebagai bahan kajian dan analisa penulis nantinya:

1. *Bai`* dimulai dengan mendefinisikan *bai`*, yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu (berniaga), hukum asal berniaga adalah harus, untuk mensahkan urusanniaga mesti memenuhi rukun jual beli, syarat ijab dan qabul serta syarat barang yang diniagakan.

Bermula *Ashal* hukum pada Berniaga dahulu daripada *ijma'*, yakni *muwâfaqat* (sepakat) segala sahabat nabi Allah dan segala ulama yang kemudian daripadanya itu beberapa ayat Quran. maka Setengah

¹¹ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat* (Bandung: Mizan, 1994), h.11

daripada ayat Itu firman Allah *subhânahu wa Ta'âlâ, wa ahallallâhu al-bay'a waharram ar-ribâ*. Artinya, Telah dihalalkan Allah ta'ala Berniaga dan diharamkannya mengambil riba. Dan, beberapa Hadits nabi Allah maka setengah daripada segala hadits itu, yaitu tatkala berdatang sembah sahabat kepadanya Ya Rasulullah apa jua yang sebaik-baik usaha, maka sabdanya, *amalu rajuli biyadihi, wa kullu bay'in mabrûrun*. Artinya, Bahwa yang sebaik-baik usaha itu kerja laki-laki dengan tangan dirinya dan tiap-tiap berniaga yang tiada berdungukan orang dalamnya dan yang tiada khianat.¹²

Soal. jika bertanya seseorang, Apa sebab tiada sah menjual sahaya yang murtad kepada kafir karena murtad itu hukum kafir jua, tetapi terlebih jahat dikata iya daripada kafirpun?. Jawab . Karena murtad itu tinggal lagi padanya mengakunya Islam, mudahan Mau ia kembali Islamnya, Wallahualam¹³

2. Terdapat beberapa larangan dalam urusan niaga menurut fikah muamalat antaranya adalah Riba, perbahasan Riba yang dimulai dengan definisi, iaitu pertambahan, jenis riba dalam hutang atau urusan niaga barang ribawi. **Bermula.** Ashal hukum pada mengharamkan riba dahulu daripada ijmak itu beberapa ayat Qur'an. Maka, setengah daripadanya firman Allah *subhânahu wa Ta'âlâ, wa ahallallâhu al-bay'a waharram ar-ribâ*.

¹² As-Syeikh Abd ar-Rauf as-Singkili, *Mir'âtu ath-Thullâb fi Tashil Ma'rifat al-Ahkam al-Syar'iyyah li al-Malik al-Wahhab*. Translated by Muliadi Kurdi dan Jamaluddin Thalib. (Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2017), h. 4

¹³ *Ibid.*, h. 4-5.

Artinya , telah dihalaikan Allah Ta'ala, berniaga dan diharmkannya riba. Dan , beberapa hadits maka setengah daripadanya hadits Muslim yaitu, *la'ana Rasûllullâh shalallâhu 'alaihi wasallam, âkil ar-ribâ wa muwâkkilahu wa kâtibahu wa syâhidahu*. Artinya, telah dikutuk Rasulullah *Shalallâhu 'alaihi wasallam*, akan orang yang memakan riba dan orang yang memberinya memakan dia, dan orang yang menyuratkan dia dan orang yang naik saksi akan dia. Hanyasanya , diharamkan riba itu pada emas dan perak dan jikalau tiada bersikukuh keduanya sekalipun seperti pakaian emas dan perak dan emas racik dan pada sesuatu yang dikasahkan akan makanan, padahal keadanya akan *quud* atau akan buah-buahan atau akan obat.¹⁴

Soal. jika bertanya seseorang adakah sah menjual kambing yang berair susu dengan kambing yang berair susu juga akan harganya seperti hukum kambing yang telah tersebut itu atau ada beda antara dua masalah ini/.

Jawab. bahwa tersebut dalam *Fathul Jawab*, tiada sah menjual yang demikian itu. Karna susu itu dimaksudkan ia pada ghalibnya daripada kambing, bersalahan dengan hukum telaga yang telah tersebut itu, melainkan disyaratkan dalamnya dengan dua syarat jua yang lagi akan datang kenyataannya *insya Allah Ta'ala*.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, h. 13.

¹⁵ *Ibid.*, h. 14.

3. Seterusnya larangan dalam muamalat ialah akad yang ditegah, terdapat akad yang ditegah boleh membatalkan akad dan ada akad yang ditegah namun tidak membatalkan akad.

Adapun . Segala yang ditegahkan oleh Rasulullah *Shalallâhu ‘alaihi wasallam* akan dia dengan tegah yang haram lagi dengan meminasakan ‘*aqad* itu, Maka yaitu daripada upah binatang jantan yang menjantani binatang betina dan daripada harga maninya. Dan, lagi pula ditegahkan daripada seseorang menjual anak-anaknya Yang belum punya jadi dan daripada ia menjual suatu mata benda akan harganya anak-anak seekor binatang yang belum punya jadi. dan, lagi pula ditegahkan daripada seorang menjual anak binatang yang lagi dalam perut induknya atau yang lagi dalam punggung binatang jantan. dan, Lagipula ditegahkan daripada *mulaamasah*, yaitu seperti kata seseorang Yang menjual suatu mata benda dengan syarat apabila kujabatlah mata benda itu maka kujuallah akan dikau, padahal kepnyalah dengan jabatannya itu akan *ijab-qabul*. Dan, lagi pula ditegahkan daripada *munabadzah*, yaitu seperti kata seseorang yang menjual , kujuallah akan dikau mata benda ini dengan harga setahil dirham umpamanya, atas syarat apabila ku-utarakan ia kepadamu niscaya lazimlah perniagaan kita dan tiadalah khiyar lagi dalamnya.¹⁶

Soal , Jika bertanya seseorang , apabila seseorang menjual rumah yang dipersewakan setahun dalam tangan seseorang umpamanya kepada orang

¹⁶ *Ibid.*, h. 18.

yang lain daripada yang menyewa dia atau kepada orang yang menyewa dia, sah jualnya atau tiada? **Jawab**, maka pada hukum Allah sah jualanya maka adalah ia seolah-olah mengi-*istisna*-kan manfaat rumahnya yang setahun itu dengan *istitsna syar'i*.¹⁷

4. Pihak yang mengurusniaga mempunyai Khiyar, iaitu pilihan untuk meneruskan urusanniaga, ia dibahagiakan kepada tiga pembahagian khiyar iaitu khiyar Majlis, khiyar Syarat dan khiyar Aib.

Adapun , Khiyar majlis itu maka yaitu *tsabit* ia pada tiap-tiap perniagaan dan jikalau menghubungkan *'aqadnya* merdeka sekalipun seperti seorang yang menebus bapaknya atau anaknya atau ibunya umpamanya. Maka haruslah baginkeduanya *khiyar majlis*, yaitu seperti hukum berniaga *ribawi* dan *bay'i salam* dan *tahuihid* dan *tasyrik* dan *mua'aawadhah* yang lagi akan datang sebutanya maka pada sekalinia ini *khiyar*, karna ia daripada segala peniagaan , karna sabda Nabi *Shalallâhu 'alaihi wasallam: Al-Bay'âni bil khiyâri mâ lam yatafarraqâ aw yaqûlu ahaduhumâ lil akhâ ikhtâra.* Artinya . Harus orang yang berjual beli itu *khiyar salam* selama belum punya lagi bercerai keduanya atau dikata oleh salah seorang daripada keduanya akan taulanya, *khiyar*-lah engkau dalamnya dan tiada harus *khiyar* pada jualnya sahaya kepada dirinya dan pada jualnya yang mengandung

¹⁷ *Ibid.*, h. 21.

merdeka karna yang dimaksudkan dari keduanya akan merdeka sahaya itu jua.¹⁸

Soal. Jika bertanya seseorang, siapa yang memilikkan mata benda yang dijual dan segala faedahnya pada masa *khiyar* itu?. **Jawab.** Maka jika ada *Khiyar* itu diisyaratkan bagi yang menjual jua tiadabagi yang membeli, maka milik pada masa itu yang menjual. Dan, jika ada *khiyar* itu bagi yang beli.¹⁹

5. Penjelasan mengenai barang yang hendak diniagakaan termasuk kepemilikan terhadap barang tersebut.

Bermula , segala mata benda yang dijual dahulu daripada menerima dia itu dalam *agun* (tanggungan) yang menjual dia artinya fasakh perniagaan sebab lenyapnya atau sebab dilenyapkan akan dia oleh yang menjual. *Tsabit Khiyar* baginya sebab 'aibnya jua ia lepas daripadanya karna ia melepaskan daripada sesuatu yang belum punya lagi seseorang beli mata benda daripada seseorang, padahal adalah mata benda ini, yakni jikalau lenyap mata benda ini sekalipun, maka tiadalah fasakh perniagaan kita, maka yang denikian itu tiada jua melepaskan yang menjual daripada *agun*.²⁰

Soal. Jika bertanya seseorang, maka jika lenyap mata benda itu dengan *afat* daripada Allah atau dilenyapkan oleh yang menjual akan dia, apa hukum perniagaan itu pada perniagaannya karna sukar menerima dia,

¹⁸ *Ibid.*, h. 26.

¹⁹ *Ibid.*, h. 29.

²⁰ *Ibid.*, h. 45.

maka gugurlah harganya daripada yang beli, artinya tiadalah wajib atas bayar dia jika belum punya lagi dibayarnya, Dan , wajiblah atas yang menjual mengembalikan dia kepadanya jika sudah diterimanya, dan ditakdirkanlah berpindahlah milik pada mata benda yang dijual itu daripada yang beli kepada yang menjual daripada ketika sedikit dahulu raipada lenyapnya.²¹

6. Perniagaan yang melibatkan perkongsian mesti dimulai dengan Tauliah (perlantikan) rakan kongsi dalam urusan niaga, penerangan tentang pembahagian harta dan jenis-jenis kontrak dalam perkongsian.

Adapun Hukum *tauliah* itu maka yaitu seperti dikata oleh orang akan seseorang yang lain kemudian daripada ia beli mata benda, *wa allaitakuka hadzal 'aqadi*, artinya telah kuberi turut kabullah engkau pada *'aqad* ini, maka kabullah akan dia oleh seseorang yang lain yang telah tau ia akan harga mata benda itu dengan katanya, kabullah aku akan *tauliah* ini maka yaitu sah *'aqad*-nya seperti hukum menjual mata benda yang dibeli daripada seseorang kepada orang yang lain seperti harga belinya, maka tiadalah laba dalamnya.²²

Soal . Jika bertanya seseorang , apabila dikata oleh yang beli mata benda kepada seseorang yang lain, kujukallah kepadamu mata benda ini dengan harga yang telah kubeli ia dengan dia, maka dikabulkan oleh seseorang yang lain akan dia seperti yang demikian itu, adakah masuk pada katanya itu lain daripada harga mata benda seperti segala biayanya atau tiada?.

²¹ *Ibid.*, h. 45.

²² *Ibid.*, h. 54.

Jawab. Tiada masuk pada katanya itu melainakan harganya jual dan jikalau dikatanya, kujuallah kepadamu mata benda ini dengan harga yang telah tetap ia atasku niscaya masuklah pada katanya itu harganya, dan segala biaya yang menuntut lana ia dengan diam seperti upah menyukat dia umpamanya. Dan, adalah dilalu dan upah mengawal dia dan upah meminar dia jika ada mata benda itu kain, dan *qimat* celupnya.²³

7. Membahaskan hukum perjualan tanah, sama ada perpindahan hak milik, mahupun penjualan dengan galian yang wujud dalam tanah tersebut. Selain itu, ditambah dengan penjelasan jual beli pokok.

Bermula , Masuk pada menjual tanah padahal *ithlaq* itu segala barang yang ada dalam tanah, yakni mengikutbkepada tanah barang yang ada dalamnya daripada segala rumahnya dan segala pohon kayunya dan segala gulai kelainnya yang dapat diambil daunnya atau buahnya dua kali atau lebih daripada dua kali. Dan , jikalau tiada kekal pohonya pada tanah itu smpai kepada 2 (dua) tahun sekalipun, demikianlah pada hukum syara' dan jikalau gulai ke lainya itu tiada diambil melainkan sekali jua seperti hukum segala pertamanya yang tiada diambil melainkan sekali, niscaya tiada ia masuk mengikuti kepada tanah itu.²⁴

Soal, Jika bertanya seseorang, Apabila seseorang menjual tanah kepada seseorang yang ada dalamnya perhamaan Yang tiada masuk pada peniagaan an itu padahal tiada tahu yang beli akan ada perhamaan

²³ *Ibid.*, h. 56.

²⁴ *Ibid.*, h. 58.

dalamnya, Adakah sah jualan pada hukum syara yang demikian itu sah atau tiada ? **Jawab** bahwa yang demikian itu sah jualannya dan harus bagi yang beli itu *Khiyar* , Itupun jika tiada Iya tahu akan pekerjaan itu lagi memberi mudharat akan dia mentakhrirkan mengambil manfaat tanah itu, dan jika tahu ia akan pekerjaan itu atau tiada tahu akan dia tetapi tiada memberi mudharat akan dia mentahirkan daripada mengambil manfaat tanah itu seperti bahwa diberikan oleh yang menjual perh anamaan itu kepada yang beli, niscaya tiada harus yang beli itu *khiyar* dan wajiblah iya mengabulkan dia. atau , di katanya, selesaikan olehmu sekira Tanah ini dan beritshabatlah pada hukum syara' Menerima tanah padahal keadaannya *masyiqhul* Dengan perhamaan Dan Tiada diupah bagi yang beli selama kekal perhamaan dalam tanah itu hingga datang kepada waktu mengambil dia, itulah hukum perhamaan Yang sudah tumbuh di bumi ini²⁵

8. Membahaskan jual beli buah-buahan berserta pohon, atau penjualan buah sahaja.

Bermula. Harus seseorang menjual buah-buahan yang nyata baiknya dengan jual yang *ithlaq*, artinya dengan syarat memutar dia atau meninggalkan daripada memutar dia dan sah pula menjual buahnya dengan syarat memutar dia atau meninggalkan dia.

Dan, jikalau buah kayu itu belum punya nyata baiknya maka dalamnya 2(dua) bicara, maka bicara yang pertama, maka jika dijual akan dia

²⁵ *Ibid.*, h. 58.

padahal di-munfarid-kan daripada pohonnya niscaya adalah yang demikian itu tiada harus, karna sabda Nabi *Shalallâhu 'alaihi wasallam, lâ tabî'u ats-tsamara hattâ yabdu shalâtuhu*. Artinya, jangan kamu menjual buah-buahan tinggal nyata baiknya melainkan dengan syarat memutar dia, maka yaitu haru dengan ijma' segala ulama, tetapi disyaratkan pula dengan lima syarat yang telah tersebut pada hukum mata benda yang dijual itu daripada keadaannya, dilihat dan member manfaat dan lain daripadanya.²⁶

Soal. Jika bertanya seseorang, apabila ada pohon kayu bagi yang beli dan buahnya bagi yang menjual seperti bahwa dijual oleh seseorang pohon kayunya yang berbuah kepada seseorang pada pertamanya, tiada ia menjual buahnya kemudian maka dijualnya pula buahnya itu kepadanya pada kedua kalinya, adakah wajib atas keduanya mensyaratkan memutar dia atau tiada?. **Jawab.** Bahwa wajib atas keduanya mensyaratkan memutar dia karna umum hadits yang telah tersebut itu, tetapi tiada lazim atas yang beli menyampurnakan syarat itu karna tiada ada faedah pada memberi akan dia dengan yang demikian itu. Dan, biacaya yang kedua, jika dijual buah kayu itu serta pohonnya dengan tiada mentafsirkan dia niscaya harus dengan tiada disyaratkan memutar dia karna bahwa adalah tatkala itu mengikut bagi pohonnya. Maka, jika dijualnya akan dia serta

²⁶ *Ibid.*, h. 63.

pohonnya dengan disyaratkan memutar dia maka yaitu tiada harus karna adalah dalamnya menghajarkan atas yang beli pada milik dirinya.²⁷

9. Akad ialah kontrak untuk mensahkan jual beli, akad mempunyai kaedah tertentu dan perkara-perkara yang boleh batalkan akad.

Bermula. jikalau bersalahan dua orang yang mengumpulkan pekerjaan 'akad sama ada keduanya yang empunya 'akad atau wakil atau warisnya atau salah seorang yang dari pada keduanya serta waris yang lain atau serta warisan atau bersalah salahan wakil Salah seorang daripada keduanya serta waris yang lain pada sifat aqad yang muwadhah lagi yang sah seperti bahwa bersalahan keduanya pada kadar 'iwadh , Yakni pada kadar mata benda yang dijual atau pada harganya atau pada jenisnya atau pada sifatnya atau pada bertanggungnya, padahal tiada saksi Bagai salah seorang daripada keduanya atau ada bagi tiap-tiap seorang daripada keduanya itu, padahal berlawanan keduanya seperti bahwa tiada ditarikhan oleh tiap-tiap seorang Daripada keduanya itu dengan 2 (dua) *tarikh* , Niscaya dihukumkan oleh hukum syara bersumpah sumpah lah keduanya pada ghalib nya, Maka bersumpahlah tiap-tiap seorang daripada keduanya itu dengan Sumpah Yang menghimpunkan *naif* dan *istinbâth* Seperti bahwa dikata oleh yang menjual dalam sumpahnya, *wallâhi* , tiada kujual akan dikau mata benda itu dengan harga sekian hanyasanya telah kujual akan dikau dengan harga sekian jua.²⁸

²⁷ *Ibid.*, h. 63.

²⁸ *Ibid.*, h. 67.

Soal. jika bertanya seseorang apabila dikembalikan oleh yang beli mata benda yang dibelinya kepada yang menjual dia sebab aibnya. kemudian, Maka kata yang menjual, bukan yang kau kembalikan ini mata benda yang telah kujual ia kepadamu itu padahal tiada ada saksi bagi salah seorang daripada keduanya, siapa disuruh bersumpah dan dibenarkan daripada keduanya? jawab titik bahwa yang disuruh bersumpah itu yang menjual jua dan dibenarkan ia dengan sumpahnya karena ashal-nya Pada pekerjaan itu lalu 'aqadnya atas Sejahteranya, maka qiyaskanlah olehmu atas hukum ini akan hukum bay'i salaam . jikalau, bersalah salah dalamnya muslim dan Muslim ilaih. Niscaya dibenarkan yang musalam itu dengan sumpahnya Allahu Allah *Wa'allâhu a'lam.*²⁹

10. Perdagangan hamba sahaya, kelayakan hambai dan perlantikan hamba sebagai wakil jualan, penerangan tentang upah.

Bermula segala *tasharruf* cahaya itu terbagi ia kepada 3 (tiga), pertama *tasharruf* -nya yang tiada sah jika lau dengan izin tuannya sekalipun yaitu seperti pekerjaan *wilayat*. Yakni memulihkan seseorang dan *syahadat*, yakni ia naik saksi akan sesuatu bagi seseorang kedua *tasharruf*-nya yang sah jikalau dengan tiada izin Tuhannya sekalipun yaitu segala ibadah dan talak dan khulu' ketika *tasharruf*-nya yang sah, tetapi dengan syarat izin tuannya seperti ia Berniaga dan bersewakan umpamanya. maka, sebab itulah tiada sah *tasharruf*-nya Pada jenis arta dengan tiada izin tuannya dalamnya, dan jikalau dibiarkan oleh tuannya akan dia pada

²⁹ *Ibid.*, h. 70.

yang demikian itu sekalipun maka tiada juga sah *tasharruf-nya* dalamnya karena bahwa adalah Iya di-*mahjûr*-kan atas bagi jua tuanya.³⁰

Soal. jika bertanya seseorang apabila tiada sah *tasharruf-nya* Dengan tiada izin Tuannya pada yang demikian itu betapa hukumnya Jika ia beli sesuatu kata benda dari pada seseorang, adakah wajib atasnya mengembalikan dia kepada yang empunya dia atau Tiada? Jawab . bahwa wajib atas mengembalikan dia kepada yang empunya dia karena mata benda itu pada hukumnya belum punya lagi keluar ia daripada milik yang menjual kepadanya. Dan, jikalau sudah dibayar saya akan harga mata benda yang dibelinya daripada harta tuannya niscaya di pintanya kembali akan dia dari padanya karena illat Yang tersebut itu jua.³¹

11. Bai` al-*salam* adalah jual beli tempahan, ia mempunyai syarat dan tempoh tertentu.

Dan, demikian lagi setengah daripada segala hukum yang seyogyanya diketahui oleh *qadhi* akan dia itu, hukum *bay'i salaam*. Artinya hukum berniaga serahan. Yaitu menjual sesuatu yang disifatkan dalam *dzimmat* dengan lafadh *salam*, maka rupa masalah ini seperti seseorang menyerahkan 2 (dua) tahlil dirham umpamanya kepada seseorang akan harga kerbau yang pada *dzimmat-nya*, padahal adalah ia mensifatkan kerbau kepadanya dengan segala sifat yang menentukan dia, maka dikatanya, *aslamtu ilaika hazihi al-darâhim fî al-jâmuus shifâtuhu kazda*

³⁰ *Ibid.*, h. 71.

³¹ *Ibid.*, h. 75.

wa kazda. Artinya. Bahwa kuserahkan kepadamu 2 (dua) tahlil dirham ini kan membeli kerbau yang sifatnya demikian-demikian, maka qabulkan oleh yang empunya kerbau akan dia.

Maka, yang demikian itu sah *salam*-nya, dan dinamailah yang empunya dirham itu *muslim*, dan yang empunya kerbau itu *musallam ilaihi*, dan dirham itu, *raksul mâli*, dan kerbau itu *muslam fih*, maka jikalau diserahkannya dirham itu kepada sesuatu yang *mu'ayyan* yang bukan ia pada *dzimmat*-nya seperti bahwa dikatanya, *aslamtu alaika hadzihi al-darâhima fî hadzal 'abdi*. Artinya, bahwa kuserahkan kepadamu dirham ini akan harga sahayamu ini, maka qabulkan oleh yang empunya sahayanya akan dia, niscaya tiada sah perkerjaannya itu akan *salam* karna ketiadaan diperoleh syarat pada *dzimmat* yang tersebut itu, dan tiada sah akan *bay'i* pun karna ketiadaan *lafadh bay'i*.³²

Soal. Jika bertanya seseorang , apabila ditentukan oleh dua orang yang ber'*aqad* pada serahan itu akan sesuatu tempat kemudian, maka keluarlah tempat itu daripada tempat yang patut mentaslimkan *muslam fih* dalamnya seperti bahwa datang pada tempatitu huru-hara atau binasa umpamyanya betapa hukumnya. Dan, dimana pula tempat yang dihukumkan oleh syara' akan dia pada mentaslimkan *muslam fih* itu?

Jawab, apabila keluarlah tempat yang tersebut itu daripada tempat yang

³² *Ibid.*, h. 75.

patut mentaslimkan dia pada tempat yang patut yang terhampir kepada tempat itu.³³

12. Terdapat pelbagai transaksi manusia sesama manusia termasuklah hutang piutang atau dikenali sebagai hukum Iqradh, juga dibahaskan hukum berhutang dan memberi hutang.

Bermula. Adalah segala rukunya itu seperti segala rukun berniaga jua dan hasil mengutang itu dengan lafadh ijab yang sharih seperti bahwa dikata oleh yang empunya arta, *aqradhtuka hadza bimitslihi*. Artinya, kuhutangi akan dikau mata benda ini dengan bahwa kau kembalikan kepadaku yang sepertinya, dan dengan qabul yang sharih seperti bahwa dikata oleh yang mengutang, *iqtaradhtu hadza minka bimitslihi*. Artinya, bahwa kuutanglah daripadamu mata benda ini dengan bahwa kukembalikan kepadamu yang sepertinya.³⁴

Soal. Jika bertanya seseorang, Apabila seseorang mengambil hutang daripada seseorang maka tatkala ia membayar dia, apa yang diwajibkan oleh syara akan membayarnya? **jawab.** bahwa yang diwajibkan oleh syara akan yang demikian itu jika ada harta yang di hutangnya itu daripada jenis yang mitsi maka dikembalikannya jenis yang misli dijual dan jika ada iya daripada jenisnya yang di qimat yakni yang di harga maka dikembalikannya sepertinya pada pihak rupanya jua.³⁵

³³ *Ibid.*, h. 77.

³⁴ *Ibid.*, h. 85.

³⁵ *Ibid.*, h. 87.

13. Hukum Rahn dimulakan penjelasan dengan mendefinisikan Rahn, syarat dan rukun Rahn. Kemudian di perjelaskan segala persoalan yang berkaitan dengan Rahn.

Adapun segala rukun *Rahn* itu empat perkara. **Pertama.** yang berakad. **kedua.** arta yang diserahkan kan. ketiga hutang yang di-*rahn*-kan itu sebabnya. keempat sifat artinya lafadz 2 (dua) yang berangkat yakni Ijab dan Qabul nya. Bermula. Disyaratkan pada *sighat* itu seperti yang telah diisyaratkan pada bay'i maka jika disyaratkan pada *Rahn* itu barang yang dikehendaki oleh *rahn* seperti mendahulukan yang mencabut *Rahn* daripada segala yang punya piutang yang lain daripada niscaya sah 'aqadnya Dan syaratnya dan demikian lagi jikalau diisyaratkan pada *rahn* itu sesuatu maslahat bagi yang mencabut sandar seperti bersaksi kan dia niscaya sah jua *aqadnya* dan syaratnya bersalaman dengan yang tiada sesuatu *gharadh* jua Pun dalamnya seperti bahwa dikatakan oleh yang menyandar bahwa kusandakan kepadamu cahayaku ini atas hutangku padamu 10 (sepuluh) tahlil dirham itu umpamanya dengan syarat bahwa ku beri makan akan dia pada tiap-tiap hari 12 (dua belah) kali beras maka yang demikian itu sah 'aqadnya dan lagha syaratnya.³⁶

Soal. jika bertanya seseorang, Apa hukum jika seseorang menyandarkan artinya kepada seseorang maka diisyaratkan oleh keduanya dengan suatu syarat yang memberi mudharat akan salah seorang daripada keduanya seperti katanya bahwa kusandakan

³⁶ *Ibid.*, h. 90.

kepadamu cahayaku ini atas hutang 10 (Sepuluh) dirham itu umpamanya dengan an-nasr apabila di utang lah kepada waktu membayar hutang bahwa , Jangan kau jual akan dia atau dengan syarat barang yang ada manfaatnya bagimu atau dengan syarat segala *zaidah*-nya Jadi akan sandaran, adakah rahn yang demikian itu atau Tiada?. **Jawab.** Bahwa tiada sah rahn pada ketiga masalah ini dari karena bahwa adalah yang demikian itu memberi Jidar akan yang dikehendaki oleh *rahn* pada masalah yang pertama dan di karena mengubah hukum akad pada masalah yang kedua, Dandy Karna tiada diketahui segala kaidah nya pada masalah yang ketiga, *Wallahu a'la*.³⁷

14. Kegagalan dalam menunaikan janji dalam kontrak akan memberi beberapa implikasi antaranya, hukum Taflis iaitu hukum muflis, serta penyitaan harta.

Bermula. Ashal pada muftiis itu bahwasanya Nabi *Shalallâhu 'alaihi wasallam*, menghajikan atas Mu'az dan menjualkan artinya akan membayar hutangnya serta dibagikan harganya atas segala yang berpiutang kepadanya. Maka, beroleh tiap-tiap seorang daripada mereka itu sekira-kira 5 (lima) sab'u hak mereka itu. Maka, sabda Nabi *Shalallâhu 'alaihi wasallam*, akan segala mereka yang berpiutang, *laisa lahu illa dzâlika*. Artinya, tiada ada bagi kamu melainkan demikian itulah. **Adapaun**, barangsiapa ada atasnya hutang yang lazim lagi tunai lagi lebih atas artinya niscaya dihajikan oleh hakim atasnya pada

³⁷ *Ibid.*, h. 91.

artanya. Jika ada ia orang yang *mustaqil* sendirinya pada *tasharruf*-nya atau dihajarkan atas walinya jika ada ia daripada orang yang tiada *mustaqil* sendirinya dan adalah hajarnya itu wajib dengan tuntutan atau tuntutan segala orang yang berpiutang kepadanya atau dengan tuntutan setengah mereka itupun, jika ada piutangnya itu piutang yang lazim lagi tunai lagi lebih atasnya artinya jua. Dan, sunnat bagi haki bersaksikan atas menghajarkan yang *mufli's* itu serta menyertakan dia supaya diketakuti segala orang yang mu'amalah dengan dia dan tiada jadi tunai hutangnya yang bertanggung sebab menghajarkan dia, *wallâhu a'lam*.³⁸

Soal. Jika bertanya seseorang, apabila dihajarkan oleh hakim akan seseorang sebab hutangnya dengan segala syarat yang telah tersebut itu, apa hukum pada arta yang dihajarkan itu? **Jawab.** Apabila dihajarkan oleh hakim akan seseorang daripada *tasharruf* pada artanya sebab banyak hutangnya niscaya ta'loklah hak segala yang berpiutang itu dengan artanya yang ditegahkan akan dia daripada men-*tasharruf*-kan dia itu. Maka, tiadalah ialah menyamai akan mereka itu pada artanya itu segala orang yang berpiutang yang baru datang piutangnya kemudian daripada dihajarkan akan dia. Dan, tiada sah pula *tasharruf*-nya pada arta itu dengan *tasharruf* yang memberi mudharat akan mereka itu seperti mengwawaqafkan dia atau menghibbahkan dia, dan tiada sah pula jualnya akan arta itu dengan tiada izin gadhi dan jikalau dijual kepada

³⁸ *Ibid.*, h. 115.

yang berpiutang kepadanya sekalipun karna hajat itu *tsabit* atas umumnya.³⁹

15. Setiap manusia mempunyai hak kebebasan dalam urusan niaga, namun begitu atas sebab tertentu seperti penipuan, kegagalan menjelaskan hutang, akan mendatang kesan kepada pengurusan harta tersebut seperti hukum hajar (tegahan) dalam urus niaga.

Bermula. Hukum *hajar* itu yaitu dua bagi dan daripadanya *hajar* yang disuruhkan akan dia karna *masalah* orang yang lain yaitu seperti menghajikan atas yang *mufli's* karna hak segala yang empunya piutang dan menghajikan atas yang menyandar pada sandarannya karna hak yang mencabut sandar, dan menghajikan orang sakit pada dua *tsulus* hartanya karna hak segala warisnya dan menghajikan segala sahaya karna hak tuanya, dan menghajikan sahaya yang dimukatabkan karna hak tuannya dan hak Allah Ta'ala kedua dari padanya hajar yang disuruhkan oleh syara' karna *masalah* bagi yang dihajikan atasnya yaitu menghajikan *majnun*, yakni orang gila dan kanak-kanak dan orang yang dungu, *wallâhu a'lam*.⁴⁰

Soal. Jika bertanya seseorang, apabila balighlah kanak-kanak itu dengan tahun atau dengan keluar maninya maka betapa hukum segala hartanya yang dalam tangan walinya, adakah wajib atas walinya memberikan arta ke tangannya dengan balighnya itu atau tiada?. **Jawab.** Maka apabila balighlah ia padahalnya ia *rasyîd* niscaya wajiblah atas walinya

³⁹ *Ibid.*, h. 116.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 126.

mentaslimkan artinya itu kepadanya karna firman Allah ta'ala, *Fain ânastum minhum rusydan fadfa'û ilaihim amwâlahum* (QS. An-Nisaa' (4):6). Artinya, maka jika kamu lihatlah daripada mereka sifat *rasyîd* maka kamu berikanlah kepada mereka it segala arta mereka dan karna tatkala itu hilanglah mani'-nya daripada *mentasharrufkan* dia.⁴¹

16. Syarat urus niaga mesti baligh dan berakal namun begitu dalam fikah muamalat dibahaskan juga menguruskan harta kanak-kanak oleh walinya atau penjaga.

Bermula. Wali kanak-kanak, yakni yang memerintahkan dia dan artinya itu bapanya kemudian maka nininya hingga sampai ke atas seperti hukum wilayahnya pada nikah jua, dan tiada berkehendak kepada adalah keduanya dengan adalah yang bathin karna sangat masyaqqah keduanya. Dan, tiada pula disyaratkan Islam keduanya melainkan jika ada kanak-kanak itu Islam maka terdapat tiada keduanya Islam jua, dan kemudian daripada keduanya maka orang yang diwasiatkan oleh keduanya pada yang demikian itu tetapi adalah orang yang diwasiatkan diisyaratkan dalamnya 'adalah bathin san kemudian daripada tempat berwasiat itu maka qadhi dirinya atau kepercayaannya.⁴²

17. Muamalat sesama manusia terdapat hal-hal yang boleh menjejaskan urusniaga tersebut seperti kegagalan menjelaskan hutang, masalah dalam perkongsian, yang mana kesemua itu perlu kaedah Sulh (perdamaian) untuk menyelesaikan persengketaan dan hak.

⁴¹ *Ibid.*, h. 128.

⁴² *Ibid.*, h. 132.

Bermula. Ashal hukum pada *shulh* dahulu daripada *ijma'* itu firman Allah Ta'aala *wa ash-shulh khairun*. Artinya, bermula *shulhu* itu amat baik, dan sabda nabi *Shalallâhu 'alaihi wasallam, ash-shulh jâizun bainal muslimîna illa ash-shulhan ahalla harâman aw harrama halâlan*. Artinya, bermula *shulh* itu harus antara segala muslim melainkan *shulh* yang menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal, maka yaitu tiada diharus.⁴³

Soal. Jika bertanya seseorang, adakah sah ber-*sulhu* daripada hutang yang tunai atas hutang yang bertanggung atau tiada?. **Jawab.** Bahwa tiada sah *sulh* yang demikian itu, yakni *lagha sulh* yang demikian itu, dan demikian lagi jika ber-*sulhu* ia daripada hutang yang bertanggung atas hutang yang tunai niscaya *lagha sulhu*-nya karna keduanya itu janji daripada yang berhutang, dan yang berpiutang maka yaitu tiada lazim tetapi jikalau disegerakannya membayar hutang yang bertanggung itu niscaya sah bayarannya dan gugurlah tanggungnya kata Syeikh Abu Al-Hasan al-Bakri *radhiyallâhu 'anhu*, maka jika disangkanya sah *sulh* yang demikian itu niscaya tiada sah menyegerakan membayar yang demikian itu maka apabila tiada sah menyegerakan yang demikian itu niscaya dipinta kembali oleh yang membayar barang yang dibayarkannya itu, dan

⁴³ *Ibid.*, h. 134.

kata Syeikh Ibnu Hajar *radhiyallâhu 'anhu* dalam, **Fathul Jawwad**, bahwa harus baginya minta kembali, *wallâhu a'lam*.⁴⁴

18. Apabila berlaku kegagalan dalam melunaskan hutang, terdapat juga kaedah Hiwâlah iaitu memindahkan hutang, ia perlu memenuhi syarat tertentu.

Bermula. Ashal hukum pada *hiwâlah* dahulu daripada *ijma'* itu khabar Bukhari dan Muslim, *mathlu al-ghaniyi zhulmun wa idza itbi'a ahadukum 'alaiya muli-a, fal yutba'*. Artinya, melambat-lambat membayar hutang orang yang kaya itu aniaya dan apabila dihiwâlahkan akan seseorang arta atas orang yang mau segera membayar hutangnya maka seyogyanyalah ia menerima hiwâlah itu. Adapun, syarat hiwâlah itu maka yaitu 6 (enam) perkara. **Pertama.** *Muhîlun*, artinya yang *berhiwâlah*. **Kedua.** *Muhtâl*, artinya yang menerima *hiwâlah*. **Ketiga.** *Muhaal 'alaih*, artinya yang *dihiwâlahkan* atasnya. **Keempat.** Piutang bagi yang menerima *hiwâlah* atas yang *berhiwâlah*. **Kelima,** piutang bagi yang *berhiwâlah* atas yang *berhiwâlahkan* atasnya. **Keenam.** *Sighah hiwâlah*.⁴⁵

Soal. Jika bertanya seseorang, apabila seseorang menjual mata bendanya kepada seseorang maka dihiwâlahkan oleh yang beli akan yang berjual menerima harganya daripada seseorang kemudian maka fasakhlah peniagaannya sebab 'aib mata benda atau lain daripadanya, betapa hukum hiwâlahnya itu adakah sah ia atau tiada?. **Jawab.** Bahwa bathal

⁴⁴ *Ibid.*, h. 136.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 138.

hiwâlahnya yang demikian itu karna terangkat harga mata benda itu sebab fasakh peniagaannya, bersalahan jikalau dihiwâlahkan oleh yang menjual akan seseorang bahwa ia menerima harga mata benda yang dijualnya itu atas yang beli, maka yaitu sah *hiwâlahnya* karna ta'lok hak pada masalah ini dengan orang yang ketiga.⁴⁶

19. Dalam berhutang perlu Dhaman (jaminan hutang) untuk menyakinkan pemberi hutang, rukun Dhaman dan soal jawab mengenai Dhaman.

Bermula. Ashal hukum pada *dhaman* dahulu daripada ijma' segala ulama itu, sabda Nabi *Shalallâhu 'alaihi wasallam, Azza'îmu ghârimun.* Artinya, orang yang mengakui itu membayar.

Adapun. Segala rukun *dhaman* yang pada *dzimmat* itu 5 (lima) perkara.

Pertama. *Madhmûnun* 'anhu. Artinya, yang diakui daripadanya yaitu yang berhutang. **Kedua.** *Madhmûnun* lahu. Artinya, yang diakui baginya yaitu yang berpiutang. **Ketiga.** *Madhmûnun fihî.* Artinya, yang diakui dalamnya yaitu hutang. **Keempat.** *Shighah.* Artinya, lafaz *dhaman.* **Kelima.** *Dhâminun.* Artinya, yang mengakui dan disyaratkan pada yang mengakui itu 2 (dua) perkara. **Pertama.** Hendaklah ia daripada orang yang *ahlut tabarru'i.* Artinya, orang yang sah tasharruf-nya dengan sendirinya. **Kedua.** *Ihktiyar* sendirinya, maka sebab itulah sah dhaman orang yang mabuk dan yang dungu yang tiada dihajarkan atasnya dan tiada sah *dhaman* kanak-kanak dan orang gila dan orang yang dihajarkan atasnya sebab dungunya dan orang yang sakit dengan sakit yang

⁴⁶ *Ibid.*, h. 139.

mematikan dia, padahal keadaan atas hutang yang menghabisi artanya dan orang yang digagahi dan jikalau ada yang menggahi itu tuanya skalipun.⁴⁷

Soal. Jika bertanya seseorang, bahwa segala hukum yang telah tersebut itu adalah ia pada *dhaman dzimmat* jua maka betapa pula hukum pada mengaku 'ain yang wajib *dhaman* dalamnya sebab dirampas atau lain yakni mengakui mengembalikan dia kepada empunya. **Jawab.** Bahwa sah mengakui 'ain mata benda yang demikian itu dan sah pula mengakui batang tubuh orang yang ghaib dari negri dan batang tubuh orang yang *mustâiq* hadirnya pada majlis hukum yakni mengakui menghadhirkannya keduanya pada majlis hukum karna hak Allah yang jenis arti atau karna *haqul adami* jikalau ada ia 'uqûbah sekalipun, tetapi adalah syarat sahnya itu dengan izin yang diakui jua dan jikalau ada yang diakui itu kanak-kanak atau orang gila atau orang yang dihabaskan orang atau mayyit dahulu daripada menanaminya dia, tetapi adalah pada kanak-kanak dan yang gila itumberkehendak kepada izin wali keduanya, dan pada *mayyit* itu berkehendak kepada izin warisnya. Dan, adalah dikehendaki dengan mengakui itu mengakui menghadhirkannya dia supaya dilihat rupanya oleh orang yang hendak naik siksa atasnya jua, *wallâhu a'lam*.⁴⁸

20. Syirkah adalah perkongsian dalam urusniaga, Syirkah juga dibahagikan mengikut kesesuaian sama ada melibatkan harta, kepakaran dan pekerjaan.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 141.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 143.

Bermula. Segala rukun *syirkah* inani itu 5 (lima) perkara, maka yang **pertama** dan yang **kedua**, dua yang *ber'aqad*, **ketiga**, ma'qud 'alaihi, yakni modal keduanya, **keempat**, barang keduanya, **kelima**, *shigat syirkah*, maka disyaratkan pada *shigat* itu hendak ada ia dengan lafaz yang memadai dan akan izin pada *beniaga* dan disyaratkan pada 2 (dua) yang *ber'aqad* itu hendak ada keduanya orang yang patut ia wakil dan akan wakil dan disyaratkan pada ma'qud 'alaihi itu keadaannya jenis *mitsli* yang dicampurkan setengahnya dengan setengahnya dahulu daripada *'aqad* dengan sekira-kira tiadalah perbezaan setengahnya dengan setengahnya atau ada ia daripada *arta* yang disekutui dalamnya, dan jikalau *mafhum* sekalipun seperti bahwa diwarisi oleh keduanya akan dia atau dibeli oleh keduanya akan dia atau dijual oleh seseorang daripada keduanya setengah mata bendanya dengan setengah mata benda taulannya karna maksud dengan bercampur hasil ia dengan yang demikian itu, tetapi diikat yang demikian itu *ablagh* daripada mencampurkan dan tiada disyaratkan bersamaan keduanya.

Dan, demikian lagi tiada disyaratkan pengetahuan akan nisbat antara keduanya pada ketika *'alqad* itu, dan disyaratkan pada kerja tiap-tiap daripada keduanya dengan *maslahat jua*. Maka, sebab itulah tiada harus tiap-tiap seorang daripada keduanya menjual *arta* itu dengan harga yang sepertinya, padahal ada di sana orang yang gemar membeli dia lebih daripada demikian itu. Dan, tiada harus menjual dia dengan harganya yang bertanggung dan dengan tiada *'aqad* *negri* itu dan tiada harus ia

membayar dia berlain dan tiada harus membayarkan dia kepada seseorang dengan tiada izin taulannya pada sekalian itu.⁴⁹

21. Penerangan mengenai konsep Wakalah termasuk rukun Wakalah dan hukum mewakilkan hamba dalam urusaniaga.

Bermula. Ashal hukum pada *wakalah* dahulu daripada ijma' segala ulama itu firman Allah Ta'ala, *wa in khiftum syiqâqa bainihimâ fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihâ* (QS. An-Nisaa' (4): 35). Artinya, maka jika kamu ketakuti akan bersalahan antara duanya laki-istri maka suruhkan oleh kamu kepada keduanya dengan ridha keduanya seorang laki-laki yang 'adil daripada kerabat suaminya dan seorang laki-laki yang adil daripada kerabat isterinya dan diwakilkan oleh suaminya atau orang yang adil daripada kerabatnya pada *mengthalaq* dia atau mengabdikan mengabdikan *'iwadhnya* dan diwakilkan oleh istrinya akan orang yang adil daripada pihak kerabatnya pada menerima thalaq atau mengkhulu' suaminya dan ceritera dalam hadits Bukhari dan Muslim bahwasanya sabda Nabi Shalallâhu 'alaihi wasallam, telah menyuruhkan akan segala pesuruhnya pada mengambil zakat arta dan berwakil itu harus.⁵⁰

Soal. Jika bertanya seseorang, adakah disyaratkan qabul yang ma'nawy itu bersegera atau tiada?. Jawab. Bahwa tiada disyaratkan bersegera dan tiada disyaratkan mengqabulkan dia pada majlis itu, *wallâhu a'lam*.⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*, h. 149.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 151.

⁵¹ *Ibid.*, 154.

22. Perbahasan mengenai *Iqrar* (sumpah) dengan mendefinisikan Iqrar, termasuk juga Iqrar dalam urusanniaga dan dalam Iqrar dalam bai *Istisna*.

Dan, demikian lagi setengah daripada segala hukum yang seyogyanya diketahui oleh *qadhi* akan dia itu hukum *iqrar*. Maka, arti *iqrar* itu 2 (dua) perkara, suatu artinya pada lughah, kedua, artinya pada syara'. Maka, yang artinya pada lughah itu, *itsbat*, artinya menetapkan, dan yang artinya pada syara' itu, seseorang menceritera akan hak orang atasnya. Bermula. asal pada *iqrar* itu firman Allah Ta'ala, *yâ ayyuhal ladzîna âmanû kûnû qawwâmîna bil qisthi syuhadâ-a lillâhi walau 'ala anfusikum*. Artinya, hai segala mereka yang percaya akan Allah, jadikan diri kamu berdiri dengan betul, padahal kamu naik saksi karna Allah, dan jikalau atas diri kamu sekalipun. Maka, naik saksi atas diri itu dinamai akan dia *iqrar* dan sabda Nabi Shallahu 'alaihi wasallam, *ughdu ya Unaisun ilâ imraatin hâdza fa in 'Itarafat farjumhâ*. Artinya, pergi engkau hai Unais kepada istri laki-laki ini. Maka, jika *iqrar* ia akan dirinya zina, maka rajamlah olehmu akan dia. Adapun, segala rukun *iqrar* itu empat perkara, suatu *muqirrun*, artinya yang beriqrar, kedua, *muqarra* lah, artinya yang di iqrarkan baginya, ketiga, *muqarra bih*, artinya yang *diiqrarkan* akan dia, keempat, *shighah*, artinya *lafadh iqrar*.⁵²

⁵² *Ibid.*, h. 162.

Soal. Jika bertanya seseorang, betapa hukum jika seseorang kanak-kanak mendakwai dirinya sudah baligh dengan tahun, adakah ia dibenarkan dengan tiada sumpahnya seperti hukum yang telah tersebut itu atau tiada?. Jawab. Bahwa tiada ia dibenarkan dengan sumpahnya hanya dituntut daripadanya saksi jua jika ada ia orang ghalib sekalipun, wallahu 'alam.⁵³

23. Penjelasan mengenai hukum *A'ariyah* (pinjam meminjam), mengambil manfaat dari pinjaman dan termasuk perbahasan tentang *al-A'ariyah* hamba.

Bermula. Ashal pada minjam dahulu daripada ijma' itu firman Allahu Ta'ala, *wa yamna'ûnal mâ'ûn* (QS. *Al-Mâ'ûn* (107): 7). Artinya. Ditegaskan mereka itu segala mereka yang meminjam kepadanya. Dan, khabar Bukhari dan Muslim bahwa adalah Nabi *Shalallâhu 'alaihi wasallam* telah meminjam seekor kuda daripada Abi Thalhah maka dikendarainya akan dia. Dan, adalah meminjam itu sunnat dan terkadang wajib seperti meminjamkan kain karna menolakkan hangat atau sejuk. Dan, terkadang haram seperti meminjamkan sahaya perempuan pada orang yang halat dan terkadang makruuh seperti meminjamkan sahaya yang Islam kepada kafir.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*, h. 164.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 177.

Soal. Jika bertanya seseorang, adakah disyaratkan pada benda yang dipinjam itu atau dihutangkan dia atau tiada? Jawab. Bahwa tiada disyaratkan menentukan dia maka sebab itulah jikalau dikata oleh yang meminjam, *lâ a'ir fi dâbbatin*. Artinya, tiada aku pinjamkan akan seekor binatang, maka kata yang meminjamkan, *qad a'rta minni dâbatin*. Artinya, sungguh telah engkau pinjam dariku seekor binatang ini, niscaya sah pinjamnya dengan katanya yang demikian itu.⁵⁵

24. Penerangan hukum Ghasab (merampas) dimulai dengan mendefinisikan Ghasab, hukum harta yang dibenarkan Ghasab dan larangan Ghasab.

Bermula. Ashal pada mengharamkan merampas dahulu daripada ijma' itu firman Allahu *Ta'âla, walâ tak-kulû amwâlukum bainakum bil bâthil*. Artinya, jangan memakan oleh setengah kamu arta setengah kamu dengan bathil. Dan, hadits Nabi *Shalallâhu 'alaihi wasallam, inna dimâ-akum wa amwâlakum wa'arâdhakum harâmun 'alaikum*. Artinya. Bahwa sesungguhnya darah kamu dan segala arta kamu dan segala *a'râdh* kamu, yakni segala hormat kamu itu haram atas kamu meminasakan dia yakni menghabiskan dia, maka arta *ghashab* itu dua perkara. Suatu artinya pada lughah, kedua artinya pada syara' maka yang artinya pada lughah itu mengambil sesuatu dengan aniaya, dan yang artinya pada syara' itu mengerasi atas hak orang yang lain dengan tiada sebenarnya seperti seseorang mengendarai binatang orang yang lain dan duduk atas hamparannya dan mengeluarkan dia dari kampungnya dan masuk

⁵⁵ *Ibid.*, h. 178.

kepadanya dengan qashad mengerasinya atas kampung itu, yakni atas yang empunya kampung.⁵⁶

Soal. Jika bertanya seseorang, apa hukum jika seseorang merampas *syai-un* yang *mataqawwâm* artinya yang jenis ada baginya harga, kemudian maka lenyap ia pada tangan yang merampas dengan apa ia dibayar dia?.

Jawab. Jika ada mata benda yang dirampas itu daripada jenis yang *mataqawwam* seperti sahaya umpamanya niscaya dibayarnya ia dengan sehabis-habis besar qimat-nya daripada ketika dirampas sampai kepada ketika lenyapnya *syai-un* itu, maka adalah perkataan ini pada nafsi sahaya itu jua. Dan adapun segala ab'adh-nya seperti tangannya atau kakinya atau lain daripada syai-un apabila lenyap ia pada tangan yang merampas niscaya adalah kata Syeikh Ibnu Hajar *radhiyallâh'anhu*, dan dibayar segala ab'adh yang tiada miqdar dirinya daripada merdehka seperti gugurnya atau lenyap bikirnya umpamanya dengan barang yang kurang daripada qimat-nya jua dengan ijma' segala ulama.⁵⁷

25. Penerangan mengenai hukum Syufa`ah, iaitu perkongsian pemilikan harta, isu yang dibahaskan hukum harta Syufa`ah yang telah dijual oleh salah satu pihak rakan kongsi tanpa persetujuan rakan kongsi.

Dan, demikian lagi setengah daripada segala hukum yang seyogyanya diketahui oleh *qadhi* akan dia itu hukum *syuf'ah*. Maka, arti syuf'ah itu 2 (dua) perkara, suatu artinya pada lughah, kedua, artinya pada syara'. Maka, yang artinya pada lughah itu menghimpunkan suatu peralihan

⁵⁶ *Ibid.*, h. 183.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 185.

kepada suatu peralihan. Dan, yang artinya pada syara'itu hak memilikkan sesuatu dengan dikuras yang *tsabit* ia bagi syarîk yang dahulu atas syarîk yang baharu pada barang yang dimilikkan ia dengan *'iwâdh* artinya, dengan ganti.

Bermula. Segala rukun syuf'ah itu tiga perkara, suatu aakhidza artinya, yang mengambil sesuatu daripada yang beli yaitu *syarîk* yang menjual maka dinamai ia *syarîk* yang *qadîm*, yakni yang dahulu, kedua, *makhûdz minhu* artinya, yang diambil daripadanya yaitu yang beli, ketiga, *makhûdz* artinya, yang diambil yaitu sesuatu yang dijual oleh *syarîk* maka disyaratkan dalam *makhûdz* itu hendak ada ia tanah serta segala yang mengikut kepadanya, lain daripada jalan yang tedapat tiada daripadanya dan hendak ada ia dimilikkan kepada seseorang dengan *'iwâdh* dan hendak ada ia jangan *bâthil* manfaatnya yang dimaksud apabila dibagi akan dia, inilah segala syarat *makhûdz*.

Dan, disyaratkan *âkhidz* itu hendak ada ia syarîk bagi yang menjual pada tanah yang dijual. Sama ada ia sebab membayar bersama-sama seperti lagi yang akan datang pada rupa masalah atau lainnya, maka tiada sah syuf'ah bagi yang lain daripada syarîk yang tersebut itu seperti orang yang sekampung karna beberapa hadits yang menunjukkan tegahnya yang demikian itu.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid.*, h.194.

Soal. Jika bertanya seseorang, apa hukum jikalau bersalah-salahan antara *âkhdz* yaitu *syarîk* yang *qadîm* dan antara *makhûdz minhu* yaitu yang beli dari kadar harga tanah seperti bahwa dikata adalah *syarîk* yang *qadîm* bahwa kecil tanah ini daripadanya dengan harga 100 (seratus) tahlil dirham umpamanya, dan kata yang beli bahwa kacil tanah ini dengan harga 200 (dua ratus) tahlil dirham padahal tiada saksinya akan seseorang daripada keduanya, maka siapa yang dibenarkan daripada keduanya?.

Jawab. Bahwa kata Imam Abu Al-Hasan Al-Bakry *radhiyallâh'anhu*, niscaya dibenarkan akan *makhûdz minhu* dengan sumpahnya dan *tsabit* lah harganya 200 (dua ratus) tahlil dirham, dan kata Syeikh Ibnu Hajar *radhiyallahu'nhu* dalam, *Fathu al-Jawwâd*, maka jikalau enggan ia daripada bersumpah, dan bersumpahlah *syarîk* yang *qadîm* niscaya diambilnyalah tanah itu dengan harga yang dipersumpahkannya.⁵⁹

26. Antara amalan muamalat yang dilaksanakan ialah *Qirâd* (juga dikenali sebagai Mudharabah), iaitu berniaga menggunakan barang orang lain. Hukum *Qirâd* dimulai dengan rukun *Qirâd*, pihak yang dibenarkan untuk melakukan *Qirâd*, pengamalan *Qirâd* dalam masyarakat.

Bermula. Ashal pada *qaradh* itu ijma' segala ulama dan lagi hajat kepadanya dan mengambil dalil baginya setengah daripada segala ulama dengan firman Allah Ta'ala, *laisa 'alaiikum junâhun an tabtaghû fadhlan min rabbikum*. Artinya. Tiada mengapa atas kamu menuntut anugerah daripada Tuhan kamu dan karna bahwa Nabi *Shalallâhu 'alaihi wasallam*

⁵⁹ *Ibid.*, h. 195.

bahwa lazim dengan *qaradh* dalamnya berdua laba dengan dia tatkala ia berwakilkan sama serta disuruhkannya seperti Nabi *Shalallâhu 'alaihi wasallam* menyuruh sahaya yang pertama Maisarah.⁶⁰

Soal. Jika bertanya seseorang, apabila sahlah 'aqad berbagi laba itu sebab di-*faur*-lah segala syarat sahnya, apa yang diwajibkan atas 'aamil pada pihak *tasharruf* pada arta itu?. **Jawab.** Bahwa hasil kata, Imam Nawawi *radhiyallâh 'anhu* yang diwajibkan atas 'âmil pada *mentasharrufkan* arta itu dengan *ikhtiyâdh* dan *mashlahat*, maka tiadalah harus baginya menjual arta itu dengan rugi yang keji dan dengan harga yang bertanggung dengan tiada izin daripada yang empunya arta, dan harus baginya menjual dia dengan mata benda dan harus baginya mengembalikan barang yang dibelinya sebab 'aib yang diperoleh daripada hal yang dibelinya, itupun jika ada pada mengembalikan dia itu *mashlahat* jua.⁶¹

27. Pertanian adalah kegiatan ekonomi utama masyarakat, untk mengeluarkan hasil yang lumayn, maka tanah pertanian itu perlu diusaha bersama. Kaedah ini dikenali kontrak *Musaqah*, iaitu kontrak mengusahakan tanaman, perbahasannya dimulai dengan rukun *Musaqah*. **Dan**, demikian lagi setengah daripada segala hukum yang seyogyanya diketahui oleh *qadhi* akan dia itu hukum *musâqât* artinya mendiris tanam-tanaman. Bermula. Segala rukun *musâqât* itu 6 (enam) perkara. **Pertama.** Si *mâlik*. **Kedua.** Si 'âmil. **Ketiga.** *Amal* yakni kerja. **Keempat.** *Syai*-un yang didirisi. **Kelima.** *Shighat*. Keenam. Tempat

⁶⁰ *Ibid.*, h. 196.

⁶¹ *Ibid.*, h. 199.

yang diharuskan dalamnya musâqât yaitu pohon kurma dan maka yaitu tiada *sah muzâra'ah*.

Dan, jikalau mengikut bagi musâqât sekalipun, kata Imam Nawawi *radhiallâhu 'anhu* bahwa, menabuh itu mengerjakan tanah dengan pohonnya setengah daripada yang hasil daripadanya, padahal keadaan benihnya daripada yang mengerjakan dia dan pula *sah muzâra'ah* yaitu seperti yang telah tersebut itu jua, padahal keadaan benihnya daripada yang empunya tanah, bahwa adalah keduanya itu ditegahkan oleh Nabi shallahu 'alaihi wasallam.

Maka, jikalau ada antara segala pohon kurma itu tanah lapang, niscaya *sah muzâra'ah* atasnya serta *musâqât* atasnya pohon kurma, padahal keadaan *musâqât* itu mengikat bagi pohon kurma karna sukar menunggalkan dia, tetapi disyaratkan dalamnya bersuatu familnya, dan lagi sukar menceraikan mendirisi pohon kurma dengan mengerjakan tanah itu dan lagi pula disyaratkan bahwa jangan diceraikan antara keduanya pada 'aqad-nya dan jangan terdahulu *musâqât* atas *musâqât* pada 'aqad-nya, bermula pada qaul yang *ashah* bahwasanya tiada harus mukhaabarah mengikut bagi musâqât, seperti yang telah tersebut itu.⁶²

28. Kontrak Ijarah ialah merujuk kepada pengambilan manfaat berserta upah, penjelasan mengenai rukun Ijarah, penggunaan barang untuk disewa.

⁶² *Ibid.*, h. 203

Dan, demikian lagi setengah daripada segala hukum yang seyogyanya diketahui oleh *qadhi* akan dia itu hukum *ijârah*. Maka, arti ijarah itu 2 (dua) perkara, suatu artinya pada lughah, kedua, artinya pada syara'. Maka artinya pada lughah menyewa menuntut bagi upah dan yang artinya pada syara' itu memilikkan manfaat serta dengan "iwadh.

Bermula. Rukun ijarah itu 4 (empat) perkara. **Pertama.** Sighah. Kedua. Upah. **Ketiga.** Manfaat. **Keempat.** Yang ber'aqad. Dan, disyaratkan dalam yang ber'aqad itu barang yang telah lalu sebutnya dalam hukum *bay'i* di antaranya seperti yang telah lalu sebutnya pada *mabi'*, lain dari pada mentaukitkan dia, yakni mengwaktukan dia seperti katanya, *ajartuka wa adfa'tuka hadzâ aw manâfi'ahu aw mallaktaha manfa'ataha*. Artinya, kusewakan akan dikau atau kuserahkan akan dikau benda ini atau segala manfaatnya atau kumilikkan akan dikau segala manfaatnya setahun dengan sekian-sekian, inilah rupa ijarah ini.

Soal. Jika bertanya seseorang, tatkala dihukumkan milik bagi yang mengambil upahan akan upah itu, adakah dihukumkan akan dia dengan lepas 'aqad atau dengan selesai kerja. Jawab. Bahwa hasil kata Imam Nawawi *radhiyallâhu 'anhu*, jika ada upahnya itu tertentu niscaya dimilikkannya ia pada ketika itu, yakni dengan semata-mata 'aqad tiada disyaratkan kemudian daripada selesai pekerjaan itu, *wallâhu a'lam*.⁶³

⁶³ *Ibid.*, h. 204.

29. Ihyâ' al-Mawât merujuk kepada penerokaan tanah baru yang bertujuan untuk meningkat perekonomian. Antaranya isu yang dibahaskan adalah kepemilikan tanah selepas dihidupkan.

Dan, demikian lagi setengah daripada segala hukum yang seyogyanya diketahui oleh qadhi akan dia itu hukum ihyaaul mauti. Artinya menghidupkan segala tanah yang telah mati dan yaitu sunnat karna hadits daripada Nabi saw., *man ahya ardhan maitatan falahu fihâ ajrun*. Artinya, barangsiapa menghidupkan tanah yang mati maka adalah baginya pahala dalamnya. Bermula. Tanah yang mati itu yaitu tanah yang belum punya lagi dihidupkan oleh seseorang juapun pada masa Islam dan bukan ia kapling yang dihidupkan orang, maka jika ada ia pada negri kita, yakni pada negri Islam niscaya dimilikkan oleh Islam akan tanah itu dengan menghidupkan dia, dan jikalau ia pada haram Mekkah sekalipun, itupun yang lain daripada 'Arafah dan Muzdalifah dan Mina, maka tiada harus dimilikkan dengan menghidupkan ketiganya oleh seseorang juapun, bersalahan dengan kafir maka tiada dimilikkan akan dia dengan yang tersebut itu jikalau dengan izin Imamsekalipun.

Dan, jika ada tanah itu pada negri kuffar niscaya dimilikkan oleh kafir akan ia dengan menghidupkan dia. Dan, demikian lagi dimilikkan Islam akan dia dengan menghidupkan dia itupun jika tiada ditegahkan mereka akan kita daripada menghidupkan dia.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid.*, h. 213.

Soal. Jika bertanya seseorang, apabila seseorang menghidupkan tanah maka ada dalamnya *ma'din* (barang-barang tambang), adakah dimilikikan ma'den itu padahal mengikut pada tanahnya atau tiada? Jawab. Hasil kata Ibnu Hajar radhiyallahu'anhu, dalam, *Fathu al-Jawwâd*, yakni tiada ketahuan ada ma'den dalamnya, sama ada ia ma'den yang bathin bagi orang yang menghidupkan dia pada ketika menghidupkan dia.

30. Waqf merupakan instrumen dalam muamalat sebagai sarana untuk pembangunan ekonomi masyarakat. Perbahasan mengenai hukum Waqf dimulai dengan rukun Waqf serta persoalan mengenai Waqf kuburan, hukum mewakafkan rumah maupun tanaman.

Bermula. Asal pada wakaf itu hadist Nabi saw., *idza mâta ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min tsalâtsin, sadaqatun jariatun aw 'ilmun yuntafa'u bihi aw waladun shâlih yad'u lahu*. Artinya, apabila mati anak Adam niscaya putuslah amalnya melainkan 3 (tiga) perkara. Pertama. Sadaqah jariah. Kedua. Ilmu yang memberi manfaat dengan dia. Ketiga. Anak yang shaleh yang minta doa baginya. Bermula. Sadaqah jariah yang tersebut itu ditanggungkan oleh segala ulama atas waqaf, adapun rukun waqaf itu maka yaitu 4 (empat) perkara. Pertama. Maukuf artinya sesuatu yang di waqafkan. Kedua. Maukuf 'alaih artinya yang diwaqafkan atasnya. Ketiga. Sighat artinya lafat waqaf. Keempat. Waaqif artinya orang yang mewaqafkan.

Adapun. Waqaf itu maka disyaratkan dalamnya hendak ada ia dengan ikhtiar dirinya lagi ahli tabarru'dan adapun sesuatu yang diwaqafkan itu

maka disyaratkan dalamnya hendak ada ia 'ain yang ditentukan lagi milik bagi yang mewaqafkan dia lagi menerima berpindah dari pada milik seseorang kepada seseorang, maka adalah hasil kata Imam Nawawi radhiallah 'anhu bahwa syarat yang mauquf itu berkekalan manfaatnya, sebab itulah tiada sah mewaqafkan makanan karna segera binasa manfaatnya tatkala binasanya dan tiada sah mewaqafkan raihan karna segera binasanya, dan sah mewaqafkan tanah Yang ada dalamnya tanam-tanaman dengan ijma' segala ulama.⁶⁵

Soal. Jika bertanya seseorang, jikalau seseorang jikalau seseorang mewaqafkan sesuatu atas 2 (dua) orang yang mua'ayyan keduanya, maka atas bagi tiap fakir seperti bahwa dikatanya, *waqafu hadza 'ala Zaidin wa' Umran watsumma 'alâ al-fuqarâ'*. Artinya, kuwakafkan syaiun ini atas si Zaid dan si 'Umar kemudian maka atas segala fakir kemudian maka mati salah seseorang dari pada keduanya, kepada siapa diberikan bagian yang mati itu? Jawab. Bahwa diberikan bahagian dari itu bagi taulannya yang hidup itu jua, tiada harus memberikan dia bagi segala fakir karna adalah yang hidup itu terlebih hampir kepada gharadh yang mewaqafkan dan karna adalah syarat berpindah waqaf kepada segala fakir itu kemudian daripada habis mati 2 (dua) orang yang *mu'ayyan* itu, maka selama ada lagi maujud keduanya atau salah seorang dari pada

⁶⁵ *Ibid.*, h. 215.

keduanya tiada harus berpindah waqaf itu kepada mereka itu, *wallâhu a'lam*.⁶⁶

31. Penjelasan mengenai rukun *Hibah al-Muthlaqah*, menghibah piutang dan hukum mengenai Hibah seperti mempusakai Hibah dan sebagainya.

Bermula. Hibah yang tersebut itu memilikkan orang yang berbuat *tathawwu'* pada ketika hidupnya akan sesuatu bagi seseorang, maka jika dimilikkannya sesuatu kepada seseorang karna hajatnya atau karna pahala akhirat maka yaitu sedekah namanya atau dipindahkan sesuatu itu bagi orang yang diberi padahal keadaannya memilikkan bagi yang diberi, maka yaitu hadiah namanya. Maka, nyatalah dengan kata ini bahwa tiap-tiap daripada sedekah dan hadiah itu hibah dan tiada 'akasnya, maka yang tiga itu sunat, dan yang terlebih afdhal daripadanya sedekah.

Bermula. Segala rukun hibah itu 3 (tiga) perkara, pertama, sighat, yaitu lafadh, kedua, yang ber'aqat yaitu yang memberi, ketiga, mauhuub, yaitu sesuatu yang diberi, dan disyaratkan pada tiga yang tersebut itu, barang yang telah disyaratkan pada hukum bay'i etapi sah menghibahkan 2 (dua) biji gandum dan tiada sah menjual dia, dan tiada pula sah menghibahkan sesuatu yang disifatkan pada dzimmat dan sah pula menjual dia dan disyaratka pada yang memberi itu hendak ada ia ahlut tabarru', maka sebab itulah tiada sah hibah daripada makatab dengan tiada izin tuannya,

⁶⁶ *Ibid.*, h. 218.

dan tiada pula sah hibahnya dari pada wali segala kanak-kanak dan orang gila.⁶⁷

Soal. Jika bertanya seseorang apabila mati salah seorang daripada keduanya, yakni yang memberi dan yang diberi dahulu daripada menerima dia, adakah fasakh 'aqad hibahnya itu atau tiada?. **Jawab.** Maka apabila mati salah seorang daripada keduanya dahulu daripada menerima dia niscaya digantikan akan dia oleh warisannya, maka tiadalah fasakh 'aqadnya itu, sebab mati salah seorang daripada keduanya karna cenderung ia kepada luzum yakni tatap, bersalahan dengan hukum syirkah dan wakalah, *wallâhu a'lam*.⁶⁸

32. Pembahasan mengenai Luqatah (barang temuan), ini termasuk rukun *Luqatah*, penjelasan mengenai *Luqatah* yang dipegang oleh kanak-kanak atau orang fasik.

Bermula. Asal pada mengambil sesuatu yang didapat dahulu daripada ijma' itu 2(dua) hadits shahih Bukhari dan Muslim, cerita daripada Zaid Ibnu Khalid Al-Juhni *radhiyallâh'anhu*, katanya bahwasanya ditanyai orang akan Nabi Shalallâhu 'alaihi wasallam daripada *luqathah* emas atau perak maka sabdanya, *'arifi 'iqamahâ wa wikâ-ahâ tsumma 'arrifhâ sanatan faillam tu'raf fas tanfiqha walitakun wadî'atan 'indaka fain jaa-a shibuha yauman minad dhahri fâdihâ ilaihi wa illa fasyaknuka bihâ*. Artinya, kenal olehmu tempatnya dan pengikatnya kemudian maka ta'rifkan olehmu akan dia kira-kira setahun lamanya, maka jika tiada

⁶⁷ *Ibid.*, h. 223.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 224.

ketahuan *luqathah* itu, yakni sesuatu yang didapat itu tiada ketahuan yang mempunyai dia, maka biayakan olehmu akan dia yakni milikkan olehmu akan dia, dan adalah ia arta taruhan padamu, maka jika datang kepadamu yang empunya arta pada satu hari daripada segala masa, maka berikan olehmu arta itu kepadanya, dan jika tiada ia datang kepadamu.⁶⁹

Soal. Jika bertanya seseorang, bahwa adalah hukum ini bagi orang yang fasek maka betapa pula hukum yang diambil oleh kanak-kanak?. Jawab. Apabila kanak-kanak mengambil akan sesuatu mata benda yang didapatnya niscaya ditinggal oleh wali akan dia daripadanya, dan ditakrifkannya akan dia kemudian, maka dimilikkannya bagi kanak-kanak itu, itupun jika ada yang demikian itu baik pada bicaranya pihak harus ia mengutang arta baginya, dan katanya Imam Abu Al-Hasan Al-Bakri, *radhiyallâh'anhu*, maka jika tiada baik pada bicaranya yang demikian itu niscaya dipeliharakannya akan dia atau ditaslimkannya ia kepada kadhi dan diqiyaskan atas hukum kanak-kanak ini hukum orang gila.⁷⁰

33. *Laqith* adalah anak kecil yang belum baligh yang ditemui di jalan, atau yang tersesat tanpa tidak diketahui nasabnya. Perbahasan *Laqith* hukum memelihara, penentuan agama kanak-kanak tersebut.

Bermula. mengambil dia fardhu kifayah dan wajib bersaksikan atasnya dan jika ada yang mengambil dia itu dhahir 'adalah-nya sekalipun karna

⁶⁹ *Ibid.*, h. 227.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 228.

takut akan diperusahaya akan dia, dan demikian lagi wajib bersaksikan atas barang yang ada sertanya daripada segala artinya karna mengikut baginya, dan supaya jangan dimilikkan akan dia oleh yang mendapat sebab jua kanak-kanak yang didapat itu hendak ada ia kecil atau gila lagi terbuang yang tiada siap orang yang maklum menganggurkan dia, dan jikalau ada ia mumayyiz sekalipun, dan yang mengambil dia itu hendak ada ia merdehka lagi *rasyîd* lagi 'adil.⁷¹

Soal. Jika bertanya seseorang, adakah harus memindahkan kanak-kanak yang didapat itu dari sesuatu tempat kepada suatu tempat atau tiada?.

Jawab. Bahwa harus memindahkan dia daripada baadiyah kepada qaryah, yakni daripada tempat Badui ke dusun, dan daripada keduanya ke negri, tiada harus 'akas. Dan, harus pula baginya memindahkan daripada tiap-tiap baadiyah dan qaryah dan negri yang tersebut itu kepada yang sepertinya, *wallâhu a'lam*.⁷²

34. Setiap pekerja mengharapkan Ji'âlah, iaitu ganjaran atas manfaat yang diambil, bahasan Ji'âlah dimulai dengan takrifan menurut bahasa dan syarak, seterusnya rukun Ji'âlah dan pembahagian *Ji'âlah*.

Dan, demikian lagi setengah daripada segala hukum yang seyogyanya diketahui oleh qadhi akan dia itu, hukum *ji'âlah*. Maka, *ji'âlah* itu 2 (dua) perkara, suatu artinya pada lughat, kedua, artinya pada syara'. Maka, yang artinya pada lughat itu nama sesuatu yang dijadikan bagi manusia atas berbuat sesuatu, yakni upahnya, dan yang artinya pada syara' itu

⁷¹ *Ibid.*, h. 234.

⁷² *Ibid.*, h. 235

lazimkan *'iwâdh* yang maklum atas berbuat sesuatu kata Imam Nawawi *radhiyallâhu 'anhu* seperti dikata oleh seseorang, *man radda 'abdi falahu kadza*. Artinya, barangsiapa yang mengembalikan sahayaku maka baginya sekian-sekian umpamanya, dan kata Imam Abu Al-Hasan Al-Bakri *radhiallahu'anhu* atau seperti dikatanya, *rudda dâbbati adhâllata walaka kadza*. Artinya, kembalikan olehmu binatangku sesat dan bagimu upah sekian-kian, maka dikembalikan oleh seseorang akan sahaya dan dikembalikan oleh yang mukhathab akan binatangitu, maka takkala itu lazimlah atas yang empunya sahaya dan yang empunya binatang upah yang dilazimkan itu, maka nyatalah dengan perkataan ini bahwa ji'alah itu tiada ia tertentu kepada upah mengembalikan sahaya yang lari jua, maka masuk dalamnya upah mengembalikan binatang yang lenyap atau lainnya daripada segala amal yang ada dalamnya kulfah, yakni berat lagi lillah.⁷³

Soal. Jika bertanya seseorang, adakah disyaratkan qabul dengan lafadh dari pada pihak yang mengerjakan itu atau tiada?. Jawab. Bahwa kata Imam Nawawi *radhiyallâh'anhu*, tiada disyaratkan qabul dari pada pihak yang bekerja, dan jikalau ditentukan ia oleh yang mengupah sekalipun, maka mumadanyalah dengan semata-mata pekerjaan daripada pihak yang mengerjakan.

⁷³ *Ibid.*, h. 237.

35. Wadi`ah merujuk kepada penjagaan harta kepada orang lain, penjelasan mengenai rukun wadi`ah dan pengambilan upah terhadap wadi`ah .

Dan, demikian lagi setengah daripada segala hukum yang seyogyanya diketahui oleh *qadihi* akan dia itu hukum *wadî'ah*, maka arti *wadî'ah* itu dua perkara, suatu artinya pada *lughah*, kedua artinya pada *syara'*. Maka, yang artinya pada *lughah* itu mengantarkan sesuatu pada orang yang lain daripada yang empunya dia, supaya dipeliharakannya akan dia, dan yang artinya pada *syara'* itu, mewakili daripada yang empunya milik atau naaib-nya bagi orang yang lain dengan memeliharakan harta, kata syekh Ibnu Hajar *radhiyallâh`anhu* dalam, **Fathu Al-Jawwâd**, bahwa sunat mengabdikan dia bagi orang yang *amîn* lagi kuasa, tetapi lazim dikata ia mengabdikan dia, jika tiada diperoleh orang yang lain daripadanya, itupun tiada dengan semena-mena, hanya dengan upahnya jua pada memeliharakan dia, lagi karna *hiriz*-nya. Dan, haram menerima dia bagi orang yang lemah daripada memeliharakan dia melainkan jika tahu yang empunya harta akan halnya, niscaya tiadalah haram atasnya mengabdikan dia. Maka, apabila haramlah atasnya mengabdikan dia, niscaya sah jua taruhan itu, maka tiada ia *dhâmin* akan *syai*-un itu. Sungguhpun demikian itu, jika ada yang menaruhkan itu wakil bagi seseorang atau wali bagi kanak-kanak, niscaya *dhâmin* yang menerima taruhan itu dengan semata-mata mengambil dia daripadanya, dan makruh menerima taruhan itu bagi orang yang tiada yakin akan amanah dirinya. Itupun, jika tiada tahu yang empunya harta akan halnya jua, inilah hasil kata Syeikh

Ibnu Hajar *radhiyallâhu 'anhu* dalam, **Fathu Al-Jawwâd**, *wallâhu a'lam*.⁷⁴

Soal. Jika bertanya seseorang, dengan apa hukum terangkat *wadi'ah* itu?.

Jawab. Bahwa terangkat ia dengan mati salah seseorang daripada keduanya, yakni yang menaruhkan dan yang menerima taruhan atau dengan gilanya, atau dengan qiamatnya. Dan, demikian lagi terangkat ia dengan minta dikembangkan ia oleh yang menaruhkan dia, dan dengan dikembangkan ia oleh yang menerima taruhan, yaitu seperti hukum *wakâlah*.⁷⁵

36. Pembahasan mengenai pembahagian Fai (harta rampasan), pengagihan Zakat dan Ghanimah.

Dan, demikian lagi setengah daripada segala hukum yang seyogyanya diketahui oleh *qadhi* akan dia itu hukum membagi *faik*, Artinya, arta yang hasil daripada *kuffar*, dan *ghanimah*, artinya arta rampasan, dan membagi segala zakat. Adapun, hukum membagi *faik* dan *ghanimah* itu, maka tiada kami sebutkan keduanya dalam kitab ini dengan *tafsil*-nya, karna tiada keduanya *mudta'mal* pada negri kita ini, hanya sanya yang ada *musta'mal* di sini pada membagi zakat jua. Tetapi, lagi akan kami sebutkan keduanya itu pada perkataan *Juhud*, yakni perang sabil atas jalan *ijmal*, *insya Allâhu Ta'ala*.⁷⁶

⁷⁴ *Ibid.*, h. 262.

⁷⁵ *Ibid.*, h. 264.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 268

D. Penaskhahan Teks *Mir'âtu ath-Thullâb*

Kedatangan Islam di Alam Melayu menyinari melahirkan cendekiawan, ahli fikir dan ahli tasawuf daripada masyarakat pribumi Alam Melayu. Hal ini memberi kesan dalam segenap aspek kehidupan termasuk juga bidang penulisan. Hal ini kerana, Islam telah membentuk suatu sistem tulisan Alam Melayu yang dikenali sebagai tulisan Jawi. Penulisan jawi hasil dari sistem tulisan huruf Arab yang diubah sesuai dengan keperluan Alam Melayu, yang menjadi medium dakwah Islam dengan penghasilan karya dalam tradisi penulisan manuskrip.

Manuskrip *Mir'âtu ath-Thullâb* adalah naskhah kitab fikah Alam Melayu dalam bentuk tulisan jawi yang ditulis atau disalin pada abab ke 17 Masehi. Manuskrip *Mir'atu al-Thullab* yang tersimpan di beberapa lokasi, hasil pengkajian awal di Perpustakaan Negara Malaysia, Kuala Lumpur, menemukan 11 buah manuskrip yang diberi kode seperti berikut; MSS 1046, MSS 1532, MSS 2470, MSS 2674, MSS 3524, MSS 3564, MSS 3808, MSS 3858, MSS 3867, MSS 4255 dan MSS 4551. Hasil penelitian awal didapati hanya 5 buah manuskrip yang lengkap, iaitu MS 1046, MSS 2470, MSS 3867, MSS 3808 dan MSS 3858. Manakala di Perpustakaan Nasional Indonesia, Jakarta, terdapat enam manuskrip dengan kod seperti berikut : A 234, A581, ML 289, ML 399, ML 455 dan ML 473. Seterusnya di Perpustakaan Ali Hasymy, Banda Aceh, terdapat lima koleksi manuskrip seperti berikut: 105/FK/1/YPAH/2005, 218/FK/2/YPAH/2005, 6/26/FK-13/TA/2006, 7/25/FK-14/TA/2006 dan 9/24/FK-15/TA/2006. Di Perpustakaan Universiti Leiden, Belanda, terdapat lima manuskrip dengan kod

seperti berikut: MS Cod.Or.1633, MS Cod.Or.3255, MS Cod.Or.5834, MS Cod.Or.5837 dan MS Cod.Or.7651.⁷⁷

⁷⁷ Shahrul Hilmi bin Othman, *Muamalat Dalam Mir'âtu ath-Thullâb: Satu Pengenalan Intisari*, Jurnal 'Ulwan 'Ulwan's Journal Jilid 4 2019 : 1-13